

PERFILMAN DI INDONESIA TAHUN 1950-1965

Melza Huzelmi¹, Meri Erawati², Refni Yulia³

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI
Sumatera Barat

huzelmimelza@gmail.com¹, mry.merierawati@gmail.com², refniyulia17@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Perkembangan Perfilman di Indonesia dari tahun 1950-1965. Penelitian ini masuk kedalam kajian studi kepustakaan, yang bersumber dari buku-buku, baik itu buku online dan buku diperpustakaan, dan dibantu dengan jurnal dan situs internet lainnya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu : 1). Apa yang dimaksud dengan *The Long March Of Siliwangi* sebagai tonggak baru film nasional dan munculnya film-film nasional lainnya, 2). Bagaimana arus film impor ke pasar film Indonesia, 3). Bagaimana kebijakan Soekarno menutup akses film impor yang mendominasi dunia film di Indonesia, dan bagaimana pengaruh kebijakan tersebut terhadap perkembangan film Indonesia. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian sejarah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Sejarah. Metode Sejarah ini terbagi atas empat tahapan yaitu : 1). Heuristik 2). Kritik Sumber 3). Interpretasi 4). Historiografi. Hasil penelitian ini yaitu melihat perkembangan perfilman Indonesia dari tahun 1950-1965 yaitu Perfilman nasional dimulai dari tahun 1950 dengan dibuatnya film *The Long March Of Siliwangi* sebagai tonggak kedua film di Indonesia dan dengan ini mulai bermunculannya film-film nasional, namun film nasional ini digeser keberadaannya oleh film impor yang masuk ke Indonesia, film yang di dominasi oleh film impor dari Amerika, namun usaha untuk mengembangkan film nasional tetap ada dengan dibuatnya kebijakan untuk menutup akses film impor ke Indonesia dengan dilakukan pemulangan terhadap film impor yang masuk ke Indonesia dan dilakukan pembinaan terhadap perfilman Indonesia untuk perkembangannya.

Kata Kunci: Perfilman, Film Nasional, Impor

PENDAHULUAN

Film merupakan produk karya cipta seni dan budaya yang menjadi media komunikasi, dibuat berdasarkan asas sinematografi. Film menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Indonesia atau dahulunya disebut dengan Hindia Belanda pada saat itu, namun sebelum film masuk yang menjadi hiburan pada saat itu seperti tontonan panggung Anak Wayang, Hindia Belanda mulai mengenal film dan bioskop sejak abad ke 19, saat masih dijajah oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Film yang masuk ke daerah Hindia Belanda pada saat itu ialah film impor dari negara-negara lain seperti film dari Amerika, film-film yang masuk ke Hindia Belanda pada saat itu menjadi sebuah tonton yang menarik dan dianggap ajaib bagi masyarakat Hindia Belanda pada saat itu, dikarenakan film yang ditayangkan dilayar lebar yang bergerak dan disebut sebagai gambar hidup, sehingga Hindia Belanda terinspirasi untuk mencoba membuat film juga. Film pada masa Hindia Belanda yaitu film yang terinspirasi dari cerita kehidupan rakyat pribumi pada saat itu yang berasal dari rakyat pribumi Sunda, dan untuk pemainnya sendiri juga diambil dari pribumi itu sendiri yang telah dipilih, ceritanya berupa dongeng yang berjudul *Loetoeng Kasaroeng*, Pembuatan film ini dijadikan sebagai tonggak awal untuk industri sinema Hindia Belanda, karena merupakan produksi pertama bagi Hindia Belanda. Selain film *Lotoeng Kasaroeng* juga terdapat beberapa film yang diproduksi pada masa Hindia Belanda ini seperti film *Eulis Atjih* dan juga film *Terang Boelan*. Film pada masa Hindia Belanda ini juga diatur oleh Peraturan Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu yang dijelaskan dalam *Staatblaad* No 688, Tahun 1922.

Keberadaan film pada masa Hindia Belanda ini untuk kebijakan dan pengaturannya sesuai dengan kepemimpinannya, seperti kedudukan Belanda di Indonesia digantikan dengan Jepang, jadi untuk perkembangan perfilman selanjutnya tergantung dari kepemimpinan penguasa berikutnya. Pada masa kekuasaan Jepang di Indonesia tidak terlalu tertarik terhadap perfilman, karena tujuan utama Jepang bukanlah pada bidang seni ataupun perfilman, melainkan tujuan utamanya yaitu rempah-rempah, kekayaan, kekuasaan, namun Jepang melihat perkembangan film yang terjadi pada masa kedudukan Belanda, ini

diminatti walaupun film yang ada didominasi dari film impor juga, sehingga Jepang mencoba untuk melihat perfilman yang ada pada saat itu, dan akhirnya Jepang menganggap bahwa perfilman ini penting sebagai alat propaganda pada saat itu. Namun untuk film pada masa Jepang jumlah produksinya masih sedikit yaitu 1-2 dalam setahun. Perfilman pada masa Jepang ini juga diatur oleh pemerintahan Jepang yang dinyatakan dalam Undang-Undang film yaitu *Eiga Ho*.

Setelah pemerintah Jepang berakhir Bangsa Indonesia pada perkembangannya berpengaruh dalam dunia perfilman, meskipun pada saat itu bangsa Indonesia masih sibuk-sibuknya dengan suasana mempertahankan kemerdekaan Indonesia tetapi masih tetap berusaha membangun dunia perfilman, dan dibuatlah Pusat Peredaran Pilm Indonesia (PPPI), selanjutnya PPPI mengadakan diskusi dengan pemerintah sebagaimana bentuk perhatian pemerintah terhadap perfilman.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah dalam penelitian ini terdiri dari empat tahap yaitu, Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, Historiografi. Tahapan awal penelitian yaitu mencari dan mengumpulkan data, dalam melakukan pengumpulan data ini ada teknik untuk mendapatkan data yang valid, yang terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan buku-buku sebagai sumber utama penelitian ini, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian ini yaitu kajian studi kepustakaan. tahap selanjutnya yaitu dengan cara kritik sumber yaitu tahapan menguji keabsahan dari sumber yang kita temukan tersebut melalui kritik sumber internal dan kritik sumber eksternal, dan dilanjutkan dengan mengelompokkan data yang ditemukan tersebut dan dilanjutkan dengan membuat hubungan kausalitas serta merangkai fakta sejarah secara kronologis, untuk tahapan akhir yaitu dilanjutkan dengan penulisan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Film *Dara dan Doa* sebagai Tonggak Baru Film Nasional Dan Muncul Film-Film Nasional Lainnya.

Dara dan Doa merupakan film pertama Indonesia setelah Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) film *Dara dan Doa* merupakan film yang diproduksi oleh Indonesia sendiri yaitu film yang di sutradarai Usmar Ismail, film *Dara dan Doa* ini pengambilan gambar pertama yaitu pada 30 Maret 1950. Tanggal tersebut dijadikan juga sebagai hari yang istimewa bagi dunia perfilman nasional karena pada 30 Maret 1950 ini ditetapkan sebagai hari film nasional. Setelah film *Lotoeng Kasaroeng* yang menjadi tonggak pertama film di Indonesia.

Cerita dalam film *darah dan Doa* yaitu berbentuk narasi yang difokuskan pada Kapten Sudarto namun dalam film ini Sudarto bukan sebagai prajurit melainkan sebagai manusia biasa, Sudarto dalam perjalanannya terlibat dalam cinta dua gadis, namun Sudarto sudah memiliki istri dan juga anak, namun anaknya meninggal terbunuh pada zaman Revolusi. Dalam perjalanan tersebut Sudarto mendapat panggilan untuk melakukan penelitian,. Sudarto tidak memenuhi panggilan tersebut karena selama perjalanan tersebut Sudarto mendapat laporan yang tidak menguntungkan dari anak buahnya dan akhirnya Sudarto keluar dari Tentara, dan film ini nantinya diakhirinya dengan ditembaknya Sudarto oleh para anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun tahun 1948 yang berarti terjadinya perang saudara.

2. Arus Film Impor Ke Pasar Film Indonesia

Arus film impor dipasar film Indonesia ini mendominasi jumlah film Indonesia, banyaknya jumlah film impor yang masuk ke Indonesia mengakibatkan film Indonesia tersaingi. Adapun film-film impor yang masuk ke Indonesia dari berbagai negara seperti dari Italia, Filipina, Malaysia, India, Inggris, Belanda, China dan Amerika. Amerika merupakan negara yang terbanyak untuk mengimpor film ke Indonesia dilihat dari tahun 1950-1955 sudah ada 12.066, sedangkan untuk Indonesia sendiri dari rentang waktu yang sama hanya ada 272, jauh perbedaan jumlah film Indonesia dengan Amerika, dan banyaknya jumlah

film impor yang masuk serta film impor ini mendominasi bioskop-bioskop yang ada.

Bioskop sendiri bukan hal yang asing bagi masyarakat pada saat itu, karena hampir setiap daerah memiliki bioskop dan untuk penayangan hampir setiap hari dilakukan pemutaran dan juga adanya iklan tentang film yang ditayangkan, namun untuk bioskop-bioskop ini dibuat batasan-batasan dan tidak semuanya bisa di masuki oleh kaum pribumi, dan penayangan film impor berada dibioskop kelas pertama, pada tahun 1950 ini bioskop di buat senyaman mungkin untuk menarik penonton untuk datang kebioskop.

Bioskop pada saat itu memang menjadi hiburan yang terdepan, karena masyarakat menganggap bahwa menonton film di bioskop menjadi suatu ajang yang berkelas bagi masyarakat, dan kondisi seperti ini di manfaatkan bagi pengusaha-pengusaha bioskop untuk mengembangkan perbioskopa di nasional, dengan melihat hal itu, pengusaha film impor berusaha untuk memadai perlengkapan bioskop.

Film impor di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi penontonnya dan juga dinantikan oleh para penonton, untuk penayangannya sendiri berada di bioskop teratas. Film impor Amerika sendiri telah memiliki lembaga yang mengatur tentang filmnya di Indonesia yang disebut dengan *American Motion Picture Association of Indonesia (AMPAI)* dan *Filem Amerika Serikat*, film ini dijadikan politik bagi Amerika dilakukannya Distributor film-film ke Indonesia terutama dibioskop kelas atas ini supaya mendapatkan pemasukan yang maksimal selain itu *American Motion Picture Association of Indonesia (AMPAI)* juga melengkapi peralatan dibioskop-bioskop Indonesia seperti peralatan sinemaskop, diketahui bahwa bioskop kelas 1 tersebut yang di isi oleh para kaum elit dan menengah saja, mereka lebih suka akan film Barat dibandingkan film nasional, namun film nasional masih mencoba untuk tayang dikelas 1 tersebut, namun para penonton dibioskop kelas 1 tersebut menganggap bahwa film nasional ini rendah.

3. Kebijakan Masa Sorkarno untuk Menutup Akses Film Impor

Kebijakan sering dipertukarkan dengan istilah tujuan atau keputusan, peraturan perundang-undangan, dan usulan, adapun inti dari sebuah kebijakan yaitu bukan tentang apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga pada apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan ini biasanya memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan masyarakatnya. Adapun kebijakan yang dimaksud yaitu seperti kebijakan publik yang berkaitan dengan urusan publik, dan juga memberikan arahan dan tindakan atas perilaku pemerintah. Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kebijakan publik, kebijakan publik merupakan kebijakan yang berkaitan dengan orang dan juga publik, sama halnya dalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan orang dan juga dengan publik.

Kebijakan dari pemerintah untuk mengatur perfilman di Indonesia sebagai bentuk usaha untuk mengembangkan perfilman nasional dengan menutup akses film impor ke Indonesia. Keberadaan film impor ini semakin menguasai dunia perfilman Indonesia, dan membuat film Indonesia ini semakin tersudutkan dengan keberadaan film impor, sehingga para sinemawan Indonesia membuat sebuah aksi menutup studio-studio film yang disampaikan oleh Persatuan Produser Film Indonesia (PPFI) sebagai bentuk protes terhadap tidak adanya perlindungan dari pemerintah terhadap film-film nasional yang disaingi oleh film impor. Dilanjutkan dengan pemberhentian produksi film nasional untuk sementara dan aksi berikutnya yang dilakukan yaitu pemecatan para artis karena tidak ada biaya untuk membayar para artis tersebut dan juga sebagai bentuk pemogokan terhadap pemerintah. Pemogokan ini mendapatkan reaksi penolakan terhadap Sarbufis dan Lekra. Sarbufis dan Lekra merupakan serikat buruh film dan juga sebagai lembaga kebudayaan dari masyarakat yang tidak terima akan adanya penutupan terhadap studio-studio dan juga pemecatan terhadap artis serta teknisi perfilman ini, dan karena apabila hal tersebut dilakukan para artis, buruh film ini kehilangan atas pekerjaannya, sehingga para Sarbufis dan Lekra meminta pemerintah untuk menanggapi masalah ini, Sarbufis juga meminta pemerintah untuk menjamin membuka kembali studio-studio serta juga memberikan perlindungan terhadap

buruh dan artis film ini nantinya, juga mendorong para pekerja baik itu buruh film, artis dan lainnya untuk memperkuat persatuan.

Dilanjutkan dengan pemboikotan film Amerika, aksi ini dilakukan karena film Amerika merupakan musuh bagi perkembangan film nasional yang telah mendominasi dunia perfilman di Indonesia, dan dilanjutkan dengan dibentuk sebuah lembaga yang disebut dengan Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) pada tahun 1964 atas kesepakatan dengan Presiden Indonesia serta adanya peraturan pemerintah untuk pembinaan terhadap film Indonesia yang diatur dalam Penetapan Presiden Indonesia Nomor 1 Tahun 1964. Adapun tujuan utama dari aksi ini yaitu ingin menghapuskan dominasi film Amerika Serikat, dan juga sebagai bentuk untuk pembubaran *American Motion Picture Association of Indonesia (AMPAI)*, dan juga memberhentikan distribusi film Amerika ini. Adapun lembaga yang terlibat dalam masalah-masalah mengenai politik film ini yaitu seperti Kementerian Penerangan dan Kementerian Perdagangan, lembaga tersebut setuju dengan tujuan dari Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS) karena adanya penyesuaian dengan kebijakan perfilman dengan konsep Nasakom dan Manipol Usdek, yaitu konsep politik yang dikeluarkan oleh Soekarno.

4. Pengaruh Kebijakan Soekarno Terhadap Perkembangan Film Nasional

Adapun usaha kebijakan Soekarno yang dilakukan yaitu aksi penutupan akses film impor ke Indonesia terutama film Amerika Serikat, yang merupakan saingan bagi film nasional, usaha yang dilakukan ini terus berjalan dan adapun pengaruhnya terhadap film nasional yaitu film nasional dibentuknya suatu badan untuk pembinaan film ini yang disebut dengan Badan Pembinaan Perfilman (BPP), yang di bentuk oleh Menteri Penerangan pada tanggal 22 Desember 1964, yang dipimpin oleh Soemarmo. Namun untuk kondisi film Indonesia semakin menurun meskipun film impor telah diboikot di Indonesia, banyaknya bioskop-bioskop yang tutup terutama bioskop kelas 1 karena film impor tidak ditayangkan lagi dan digantikan dengan film nasional, namun film nasional ini tidak menarik minat para penonton, dan semakin hari jumlah film ini pun semakin berkurang.

Ditambah lagi dengan terjadinya kudeta pada September 1965, dunia perfilman ini terancam mati beberapa bulan saat Indonesia sedang terancam akan perang sipil, yang mengakibatkan produksi, distribusi, dan perbioskopian dilumpuhkan oleh unsur luar lingkungan perfilman, dan adanya pemberlakuan jam malam, pembatasan pemutaran film sehari-hari, dan mulai adanya pemutaran film secara liar atau diam-diam. Kondisi film setelah pemboikatan film impor tidaklah baik-baik, karena pada September 1965 film mulai melumpuh karena peristiwa September 1965 yaitu terjadi pembantaian terhadap tokoh-tokoh Indonesia yang disebut dengan peristiwa G30 S/PKI dari peristiwa ini juga berimbas kepada dunia film karena kondisi pada saat tidaklah aman dan membuat keamanan film ini tidak jelas dan melumpuhkan semua aktivitas produksi film nasional, dan membuat film nasional ini mengalami krisis.

KESIMPULAN

Film masuk pada abad ke 19 ke Indonesia, namun kondisi Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda, atau masih disebut dengan Hindia Belanda, film pertama masa Hindia Belanda disebut sebagai tonggak awal film bagi Indonesia yang berjudul *Loetoeng Kasaroeng*, dan mulai bermunculan film-film Hindia Belanda lainnya, namun perfilman pada masa Hindia Belanda ini tidak lama sama dengan kekuasaan Belanda di Indonesia, dan dilanjutkan dengan masa kekuasaan Jepang di Indonesia, pada masa kekuasaan Jepang ini film dijadikan sebagai alat propaganda untuk menarik simpati masyarakat. Dilanjutkan dengan masa perfilman di Indonesia dengan munculnya film nasional sebagai tonggak film kedua bagi Indonesia yang berjudul *Dara dan Doa* dan dengan film ini mulai bermunculan film-film nasional lainnya, namun film-film nasional ini untuk pasar distribusinya dipengaruhi oleh film impor, yang mana film di Indonesia yang didominasi oleh film impor terutama dari Amerika, dan perbioskopian di Indonesia hampir semuanya dikuasai oleh film impor, dan menghambat perkembangan film nasional, dan dibuatlah kebijakan untuk menutup akses film impor ke Indonesia untuk perkembangan film nasional, dan kemajuan perfilman nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Biran, M. Y. (2009). *Sejarah Film 1900-1950 Bikin Film Di Jawa*. Dewan Film Nasional.
- Budiarto Danujaya, D. (1992). *Layar Perak 90 Tahun Bioskop Di Indonesia*. PT Gramedia Utama Jakarta, Dewan Film Nasional.
- Erawati, M. dan Sunarti, L. (2021). Masa Keemasan Sinema Sebagai Hiburan di padang (Sumatera Barat) 1970-1990-an. *Dalam Membedah Sejarah Dan Mempermasalahkan Masa Lalu di Indonesia*
- Erawati, M. (2015). Budaya Dalam Lintasan Sejarah : Booming Nonton Bioskop di Padang Tempo Dulu. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 4 (1)
- Masak, Tanate Pong. (2016). *Sinema Pada Masa Soekarno*. Fakultas Film dan Televisi Institute Kesenian Jakarta.
- Novi Kurnia .2006. *lambannya pertumbuhan Industri Pefilman*. jurnal ilmu sosial dan ilmu politik ISSN . vol 9,No 3
- Pemerintah Indonesia.2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009. Tentang Perfilman*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060.
- Yulia, R. (2020). Revitalisasi Kawasan Kota Tua Padang Sebagai Salah Satu Alternatif Wisata Sejarah di Kota Padang. *Bakaba : Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan kependidikan*, 2022, 6.2: 17-22
- Yulia, R., Erawati, M., dan Nopriyasman, N. (2016). Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Wisata Berbasis Kota Tua di Kota Padang, *KRONOLOGI*,8 (1)